

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu fenomena di dunia yang sangat mengkhawatirkan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menguranginya, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Salah satu negara yang meghadapi permasalahan ini adalah Indonesia, dimana jutaan orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut (Desmawan et al., 2021) kemiskinan sendiri diartikan sebagai ketidakmerataan sosial. Ketidakmerataan sosial yang dimaksud berarti bahwa kemiskinan dianggap sebagai akibat dari distribusi sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan yang tidak adil atau tidak merata di masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan bukan hanya akibat dari kekurangan uang atau aset seseorang, tetapi juga akibat dari ketimpangan dalam akses terhadap layanan, hak, dan peluang yang seharusnya dinikmati setiap orang.

Pada dasarnya, masyarakat yang tergolong miskin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki keterbatasan dalam menjalankan usaha. Selain itu, mereka juga memiliki akses yang minim terhadap kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dibandingkan kelompok masyarakat lain yang memiliki potensi lebih besar. Kemiskinan juga dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti semakin banyaknya kejahatan, menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat karena minimnya pendapatan masyarakat miskin (Kurnia Malta & Sutikno, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2020-2024

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2020-2024	
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)
2020	26,99
2021	27,02
2022	26,31
2023	25,9
2024	25,22

Sumber : BPS Indonesia, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 25,22 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Namun terdapat penurunan angka kemiskinan yaitu pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,36% atau 25,9 juta orang sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu tantangan ini terus menjadi perhatian serius bagi Indonesia karena masih ada jutaan individu yang berada dalam kondisi ekonomi di bawah standar garis kemiskinan.

Salah satu hal yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran (Hilmi et al., 2022). Pengangguran merupakan kelompok dalam angkatan kerja yang belum menjalankan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Seseorang dikatakan sebagai pengangguran jika ia belum memiliki pekerjaan atau belum terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan uang, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sudah bekerja namun belum mendapatkan hasil yang produktif (Tanjung et al., 2021). Tingkat kemakmuran suatu masyarakat

sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang mereka peroleh, yang pada akhirnya mencerminkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik (Hilmi et al., 2022). Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan keperluan finansial setiap individu juga ikut bertambah. Semakin besar pertumbuhan penduduk, semakin sedikit peluang kerja yang tersedia, akibatnya total pengangguran pun meningkat. Pengangguran timbul karena jumlah penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Pada hakikatnya, penambahan penduduk ini mempunyai dua aspek yang berbeda (Yanti & Sudibia, 2019). Di satu aspek, penambahan penduduk bisa meningkatkan potensi pasar dan tenaga kerja, yang seharusnya menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di aspek lainnya, jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, maka dampaknya justru akan menjadi beban sosial dan ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat

Kota Surabaya sebagai ibu kota di Jawa Timur kerap menjadi tujuan urbanisasi penduduk dari berbagai daerah. Dilansir dari disdukcapil.surabaya.go.id (diunggah pada 9 Juli 2024) [berita Disdukcapil Kota Surabaya](#) sebanyak 23.970 orang memilih Kota Surabaya sebagai tempat tinggal baru mereka. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk, baik dari urbanisasi maupun penduduk asli Kota Surabaya. Akibatnya, lapangan kerja yang tersedia di Surabaya sering kali tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ketidakseimbangan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan menciptakan tantangan ekonomi serta sosial di kota tersebut, yang

membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi dampaknya. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Surabaya, Tahun 2020-2024

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Surabaya, Tahun 2020-2024			
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2020	592.137	145,67	5,02
2021	611.466	152,49	5.23
2022	652.540	138,21	4,72
2023	718.370	136,37	4,65
2024	742.678	116,62	3,96

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan dari Rp592.137 pada 2020 menjadi Rp718.370 pada 2023, sementara jumlah dan persentase penduduk miskin sempat meningkat di 2021 namun kemudian menurun. Pada 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 136,37 ribu orang (4,65%). Data jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya masih menghadapi masalah sosial yang cukup serius. Untuk memahami kondisi ini dengan lebih jelas, perlu juga melihat data tingkat pengangguran, karena pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2024

Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kota (Persen) Tahun 2024
Kota Malang	6,10
Kota Blitar	5,11
Kota Surabaya	4,91
Kota Pasuruan	4,63
Kota Probolinggo	4,44
Kota Madiun	4,30
Kota Kediri	3,91
Kota Mojokerto	3,76
Kota Batu	3,63

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024

Dalam tabel tersebut, Kota Surabaya memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91%, menempatkannya pada posisi ketiga tertinggi di antara kota di Jawa Timur. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya mempunyai tingkatan pengangguran yang relatif tinggi jika disandingkan dengan banyak wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, yang rata-rata TPT-nya mencapai 4,19%. Tingginya angka pengangguran di Surabaya ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya, terutama mengingat posisi Surabaya sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi di Jawa Timur. Berikut merupakan data pengangguran terbuka Kota Surabaya dari tahun lima tahun terakhir :

Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya, Tahun 2020-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2024

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Menurut BPS TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengangguran terbuka sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT di Kota Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023, yang mengalami penurunan tiap tahun. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka ada di angka 9,79%, kemudian turun menjadi 9,68% pada tahun 2021, 7,62% pada tahun 2022, dan mencapai 6,76% pada tahun 2023.

Tingkat pengangguran seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab dengan adanya pekerjaan, masyarakat bisa lebih memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, untuk memastikan bahwa penurunan pengangguran ini benar-benar berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, diperlukan dukungan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan serta layanan publik. Pengangguran masih menjadi salah satu masalah utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya ini wajib diatasi dengan saling bekerja sama baik dari

pemerintah maupun masyarakat sendiri. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (*empowerment*) menurut (Afriansyah et al., 2023) sendiri dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Sedangkan menurut (Suharto, 2014) pemberdayaan masyarakat adalah sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Dalam menanggulangi hal tersebut Pemerintah kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Keluarga Miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli Masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja berbasis tenaga kerja lokal. Penerima manfaat dari program Padat Karya Pemerintah Daerah Kota Surabaya yaitu masyarakat miskin yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Surabaya. Tujuan program ini dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 sendiri yaitu diantaranya 1) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah; 2) mewujudkan peningkatan akses Keluarga Miskin kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; 3) penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan

Padat Karya; 4) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi Masyarakat; 5) mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah; 6) meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin di Daerah. Peningkatan akses dan penciptaan lapangan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dalam program ini ditujukan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Kota Surabaya.

Program padat karya ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemberdayaan serta/atau pengelolaan usaha mikro. Rumah Padat Karya termasuk dalam kategori pemberdayaan serta/atau pengelolaan usaha mikro. Dalam skema ini, keluarga miskin berperan sebagai penerima manfaat utama, sementara Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator pemberdayaan yang menjalankan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan wadah usaha yang produktif bagi keluarga miskin. Melalui program ini, keluarga miskin diarahkan untuk membentuk kelompok usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, bantuan dalam pengurusan perizinan, akses permodalan serta fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan. Upaya ini dimaksudkan agar kelompok usaha mampu tumbuh secara mandiri dan menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Dukungan pemerintah terhadap program ini tidak hanya terbatas pada pelatihan, namun juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana usaha seperti lahan dan peralatan produksi. Selain itu, bentuk bantuan usaha lainnya termasuk skema pembelian langsung hasil produksi oleh instansi pemerintah, yang memberikan

jaminan pasar bagi produk kelompok usaha. Tidak hanya itu, kelompok usaha juga diberi kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan koperasi atau lembaga lain melalui pola kerja sama bagi hasil yang diatur secara formal.

Program padat karya di Kota Surabaya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja melalui pemanfaatan aset milik pemerintah, seperti lahan atau fasilitas umum yang sebelumnya tidak digunakan secara maksimal. Selain memberikan penghasilan, program ini juga membantu warga mengembangkan keterampilan baru yang berguna untuk masa depan. Pemerintah berharap bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Program padat karya merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di Kota Surabaya, program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dengan pengalokasian anggaran khusus guna menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Program ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan dengan mendorong perputaran ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

"Mimpi besar saya di program padat karya adalah semua masyarakat mendapatkan dan memiliki pekerjaan dengan bahu membahu berjibaku bersama pemerintah kota, dengan berjalan secara gotong-royong memanfaatkan kebersamaan," kata Wali Kota Eri Cahyadi."

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/68069/harapan-besar-rumah-padat-karya-warga-surabaya-bahagia-dan-memiliki-pendapatan> (*Harapan Besar Rumah Padat Karya: Warga Surabaya Bahagia Dan Memiliki Pendapatan*, 2022) (Diunggah pada tanggal 15 Juli 2022)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melalui program padat karya, memiliki tujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan. Dalam pandangannya, program ini dirancang agar warga Surabaya dapat bergandengan tangan bersama pemerintah kota dalam mewujudkan kesejahteraan, sehingga tidak hanya memperoleh pekerjaan tetapi juga kebahagiaan melalui penghasilan yang memadai. Rumah padat karya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan wujud konkret dari program ini. Rumah padat karya ini tidak hanya menawarkan peluang kerja tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan ekonomi kota. Melalui sinergi ini, Walikota Surabaya berharap tercipta hubungan saling mendukung, di mana setiap pihak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Menurut Surabaya.go.id Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terus aktif menjalankan program padat karya di berbagai wilayah Kota Surabaya. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidur milik Pemerintah Kota Surabaya yang luasnya mencapai sekitar 9,5 juta meter persegi, atau tepatnya 9.555.372 meter persegi. Lahan-lahan ini tersebar di berbagai area kota, sehingga program padat karya dapat menjangkau banyak warga di berbagai kecamatan. Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/71522/gencarkan-program-padat-karya-wali-kota-eri-cahyadi-manfaatkan-aset-lahan-kosong-95-juta-meter-persegi> (*Gencarkan Program Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi Manfaatkan Aset Lahan Kosong 9,5 Juta Meter Persegi*, 2022) (Diakses pada tanggal 18 Desember 2024).

Tabel 1.5 Persebaran Kecamatan Pelaksana Program Padat Karya di Surabaya

No	Kecamatan	Jenis Usaha
1.	Gubeng	Café, Potong Rambut, Cuci Motor
2.	Tenggilis Mejoyo	Laudry dan Setrika
3.	Krembangan	Magot, Budidaya Ikan
4.	Sambikarep	Café, Laundry, Cuci Motor
5.	Benowo	Cuci Mobil dan Motor, Café, Laundry
6.	Wonocolo	Jahit Bordir, Cutting Sticker, Cuci Motor, Service AC
7.	Mulyorejo	Rumah Batik
8.	Tandes	Rumah Jahit, Sablon, Jahit Bordir
9.	Bubutan	Kampung Batik
10.	Lakarsantri	Budidaya Ayam Pedaging, Ikan Patin, Jagung, Padi
11.	Jambangan	Budidaya Jagung Manis, Pepaya, Timun, Kacang Panjang, Ayam Pedaging
12.	Kenjeran	Budidaya Ketela Pohon, Kangkung, Bayam, Pisang Kepok, Terong, Lombok
13.	Sukolilo	Budidaya Ikan Lele, Ikan Nila
14.	Pakal	Budidaya Ikan Bandeng

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya, Tahun 2022

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya tahun 2022, kecamatan yang terlibat dalam program ini meliputi Gubeng, Tenggilis Mejoyo, Krembangan, Sambikarep, Benowo, Wonocolo, Mulyorejo, Tandes, Bubutan, Lakarsantri, Jambangan, Kenjeran, Sukolilo, dan Pakal. Persebaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjangkau berbagai wilayah, baik di pusat kota maupun pinggiran, guna menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya.

Tabel 1. 6 Jumlah Keluarga Miskin per Kecamatan di Kota Surabaya yang Menjalankan Program Padat Karya Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun 2024 (Jiwa)
1.	Krembangan	9.484	6.775
2.	Kenjeran	4.349	4.053
3.	Wonocolo	4.109	2.856
4.	Sambikerep	3.283	2.490
5.	Sukolilo	3.030	2.274
6.	Jambangan	1.716	1.579
7.	Gubeng	4.970	1.443
8.	Bubutan	2.804	741
9.	Pakal	1.097	633
10.	Mulyorejo	1.502	618
11.	Lakarsatri	540	337
12.	Tenggilis Mejoyo	1.086	276
13.	Benowo	396	135
14.	Tandes	20	-

Sumber : Dinas Sosial Surabaya, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.6 data menunjukkan jumlah keluarga miskin di setiap kecamatan di Kota Surabaya yang melaksanakan program padat karya pada tahun 2023-2024. Kecamatan Wonocolo merupakan salah satu Kecamatan yang menjalankan Program padat karya ini yang menempati posisi ketiga dengan jumlah keluarga miskin terbanyak pada tahun 2024, yakni 2.856 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah keluarga miskin di kecamatan ini menurun dari 4.109 jiwa pada tahun 2023 menjadi 2.856 jiwa di tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah keluarga miskin di Kecamatan Wonocolo masih tergolong tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya

Dalam melaksanakan program padat karya dalam Upaya mengurangi kemiskinan, Kecamatan Wonocolo memiliki beragam jenis usaha yang

mencerminkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai jenis usaha ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memberikan peluang kerja yang berkelanjutan bagi warga. Jenis- jenis usaha tersebut meliputi :

Tabel 1. 7 Jenis Usaha Program Padat Karya di Kecamatan Wonocolo Tahun 2022-2024

No	Jenis Usaha	Status Usaha	Jumlah Kelompok Usaha
1.	Service Air Conditioner (AC)	Aktif Beroperasi	1 (Satu)
2.	Jahit dan Bordir	Kurang Aktif Beroperasi	1 (Satu)
3.	Sablon	Kurang Aktif Beroperasi	1 (Satu)
4.	Cuci Kendaraan dan Karpet	Aktif Beroperasi	1 (Satu)
5.	Produksi Paving	Aktif Beroperasi	2 (Dua)

Sumber : Kantor Kecamatan Wonocolo, Tahun 2024

Pada tabel tersebut terdapat lima jenis usaha program padat karya di Kecamatan Wonocolo, hal ini menunjukkan adanya potensi ekonomi serta beragamnya aktivitas produktif di kawasan tersebut. Beberapa jenis usaha tersebut meliputi jasa cuci kendaraan dan karpet, service AC, produksi paving, jahit dan bordir, sablon serta cetak stiker. Jenis usaha ini tidak hanya fokus pada produksi barang tetapi juga pada sektor jasa sehingga membantu menciptakan peluang kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Program padat karya di Kecamatan Wonocolo mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni 2022 dengan jenis usaha Service AC, sesuai dengan keterangan Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Wonocolo :

“Pertama kali itu service AC, jadi awalnya kebetulan di Kelurahan Siwalankerto ada satu orang yang sudah ahli di bidang tersebut sehingga

diminta oleh Bapak Camat Wonocolo untuk melatih. Dari empat belas orang tadi diikuti dan dilaporkan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang dimana disana terdapat pelatihan (Hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2024)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kecamatan Wonocolo bersama Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan masyarakat pada Program padat karya melalui peningkatan keterampilan kerja sebelum akhirnya diterjunkan langsung. Pelatihan tersebut memberikan bekal keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga padat karya service AC di Kecamatan Wonocolo sampai saat ini masih beroperasi dengan baik.

Terdapat juga beberapa jenis usaha dalam program padat karya yang juga masih aktif beroperasi, yaitu usaha produksi paving dan cuci kendaraan. Pada usaha produksi paving saat ini masih aktif beroperasi, hasil produksi paving ini sangat memengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Usaha ini menyisakan sembilan orang pekerja yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Kelurahan Siwalankerto dan kelompok Kelurahan Jemur Wonosari. Sementara itu, terdapat juga usaha cuci kendaraan, yang meskipun hanya tersisa satu pekerja namun masih aktif beroperasi dan mampu mempertahankan usaha ini. Pekerja jenis usaha cuci kendaraan tersebut berusaha melakukan inovasi dengan menambah variasi layanan pencucian, yang awalnya hanya melayani kendaraan, kini juga menerima jasa cuci lain seperti karpet, bantal sofa, kursi hingga stroller bayi. Meskipun inovasi ini berhasil menambah pemasukan, peningkatannya masih tergolong tidak signifikan.

Namun, dibalik keaktifan usaha diatas dalam menjalankan program padat karya ini, terdapat juga jenis usaha yang dapat dikatakan kurang aktif beroperasi beberapa

jenis usaha padat karya di Kecamatan Wonocolo. Jahit dan bordir merupakan salah satu program padat karya di Kecamatan Wonocolo awalnya aktif beroperasi dan cukup menghasilkan karena dibantu dengan pemasaran dari pihak Pemerintah Kecamatan maupun Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu keaktifan usaha jahit dan bordir semakin menurun yang disebabkan oleh beberapa pekerja memilih untuk bekerja diluar padat karya ini juga disebabkan oleh kemampuan pekerja dalam menjahit masih terbatas, di mana hanya beberapa peserta yang benar-benar ahli dalam bidang ini sementara sebagian besar lainnya hanya memiliki kemampuan dasar dalam menjahit. Kemudian jenis usaha sablon dalam program padat karya juga kurang aktif beroperasi dan tidak mengalami perkembangan. Pada usaha sablon dalam menambah pemasukan Pemerintah Kecamatan Wonocolo selalu melibatkan usaha sablon dalam berbagai kegiatan di Kecamatan, namun kurang minatnya Masyarakat untuk mengelola usaha ini yang menjadi hambatan.

Sementara itu, Terdapat jenis usaha yang sudah diresmikan namun tidak pernah beroperasi yaitu cetak stiker. Meskipun pelatihan telah diberikan dan mendapat minat tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Ketiadaan fasilitas mesin cetak stiker inilah yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan usaha tersebut meskipun peluangnya cukup menjanjikan.

Menurut Pemerintah Kecamatan Wonocolo dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Wonocolo juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Faktor utama yang memengaruhi keterbatasan ini adalah rendahnya minat masyarakat untuk

bergabung dalam program padat karya di Kecamatan Wonocolo serta budaya ketergantungan pada bantuan sosial.

Tabel 1. 8 Jumlah Pekerja Masing-Masing Jenis Usaha Program Padat Karya di Kecamatan Wonocolo

No	Jenis Usaha	Jumlah Pekerja Awal diresmikan, Tahun 2022-2023 (orang)	Jumlah Pekerja saat ini, Tahun 2024 (orang)
1.	Service Air Conditioner (AC)	8 (delapan)	3 (tiga)
2.	Jahit dan Bordir	8 (delapan)	4 (empat)
3.	Sablon	10 (sepuluh)	3 (tiga)
4.	Cuci Kendaraan	8 (delapan)	1 (satu)
5.	Produksi Paving	11 (sebelas)	9 (Sembilan)

Sumber : Kantor Kecamatan Wonocolo, Tahun 2024

Pada Tabel 1.8 di atas merupakan data mengenai jumlah pekerja yang terlibat dalam berbagai jenis usaha di program padat karya. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan jumlah pekerja yang relatif sedikit, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program padat karya semakin berkurang. Berkurangnya pekerja pada program padat karya ini diakibatkan oleh kurang stabilnya pendapatan yang diperoleh sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini perlu menjadi perhatian karena jika program padat karya tidak lagi diminati oleh masyarakat, sehingga tujuannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan tidak optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Wonocolo masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ketimpangan keaktifan usaha yang terlihat jelas antara jenis-jenis usaha padat karya yang dijalankan. Beberapa jenis usaha masih aktif beroperasi dan sementara jenis

usaha lainnya mengalami penurunan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan keberlangsungan usaha pada program padat karya di Kecamatan Wonocolo agar tujuan program padat karya sesuai Perwali Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 dapat terwujud.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dan acuan untuk penelitian ini. Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Penelitian (Septiani & Pertiwi, 2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan Tambaksari telah berjalan dengan baik pada tiga dari empat tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat. Namun, langkah proses pemberdayaan Masyarakat tetap perlu diperbaiki karena belum terlaksana secara optimal. Tantangan yang dihadapi yaitu Dalam proses perekrutan anggota, terdapat kendala yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data mengenai keluarga miskin dan ketidakakuratan dalam menentukan sasaran keluarga miskin. Kemudian pada penelitian (Ariel et al., 2023) pemberdayaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Kelurahan Jeruk, Kota Surabaya, berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui penyuluhan dan ajakan partisipasi masyarakat. Program ini mendapat respons positif, dengan warga memilih pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Namun, tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya keterlibatan kelompok usia tidak produktif, sehingga pemberdayaan belum sepenuhnya optimal.

Pada penelitian (Ajiputri & Hardjati, 2024) Program Rumah Padat Karya Prapen di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, belum mampu sepenuhnya membangun kemandirian tenaga kerja dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberdayaan hasil yang dicapai masih belum optimal. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran peserta, keterbatasan akses pasar, serta pendampingan yang kurang intensif menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan program. Selanjutnya pada penelitian (Fadhilah & Wahyudi, 2023) Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya di Dukuh Sutorejo sudah berjalan dengan baik dan sejalan dengan teori. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam aspek pembinaan dan pelatihan yang lebih komprehensif bagi para pekerja MBR. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat agar para tenaga kerja MBR dapat lebih mudah mendapatkan pemberdayaan serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Terakhir pada penelitian terdahulu (Hapsari & Arif, 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan program Padat Karya Krembangan telah terpenuhi dan terlaksana dengan cukup baik dan dapat dikatakan pemberdayaan melalui rumah padat karya mampu menjadikan masyarakat lebih berdaya. Upaya motivasi dan dorongan telah dilakukan untuk membangkitkan kesadaran, namun belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan tertarik pada program ini. Pemberdayaan juga diperkuat dengan pendampingan, penyediaan sarana prasarana, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk perlindungan, program ini menjalin kemitraan dengan HIPMI dalam pemasaran hasil panen maggot serta melakukan

monitoring rutin. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sosialisasi, dan persaingan usaha yang masih perlu diatur agar program lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu tantangan terhadap pelaksana maupun pihak yang diperdayakan dalam program padat karya di Kecamatan Wonocolo. Keberhasilan pemberdayaan bergantung pada kesadaran, kemauan, dan komitmen para pelaksana maupun pihak yang diperdayakan dalam mengelola usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, selain peran penerima manfaat, dukungan dan komitmen dari pelaksana pemberdayaan juga diperlukan dalam program ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dilihat melalui pendekatan pemberdayaan oleh (Suharto, 2014) dengan pendekatan pemberdayaan diantaranya, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan. Pada pendekatan pemberdayaan tersebut dalam pelaksanaan program padat karya menunjukkan kelemahan pada pendekatan pemeliharaan dimana terdapat ketimpangan usaha yang mencerminkan kurangnya monitoring dan strategi berkelanjutan yang menyebabkan usaha tertentu tidak mampu bertahan. Juga pada pendekatan pemungkinan, dimana minat Masyarakat untuk ikut dalam program ini terbilang rendah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan program Padat Karya dapat dikembangkan lebih baik sehingga benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.

Merujuk pada uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat

Berikut merupakan manfaat dari penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya, serta memberikan referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan penulis, sekaligus menjadi panduan dalam memahami mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademis yang memiliki lingkup yang sama terutama bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

c. Bagi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kecamatan dalam mengoptimalkan program padat karya di Kecamatan Wonocolo sehingga dapat membawa dampak positif bagi Masyarakat di wilayah Kecamatan Wonocolo terutama membawa dampak baik bagi ekonomi.